

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran dan Kontribusi

1. Definisi Peran

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran adalah proses cara atau pembuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.¹⁵ Menurut para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut *Kozier Barbara* Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat relatif stabil.¹⁶

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang dapat mempunyai macam- macam peran yang berasal dari pola

¹⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 1132.

¹⁶ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Alfabeta 2002), hlm. 78

pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dibutnya bagi masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹⁷

2. Cakupan Peran

Menurut *Edi Suharto*, Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran disini bisa berarti pengaturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b) Peran adalah suatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur social masyarakat.¹⁸

3. Pengertian Kontribusi

Kata "*Kontribusi*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti uang iuran (kepada perkumpulan atau sebagainya) dan juga berarti

¹⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-3, hlm. 158-159.

¹⁸ Suharto, Edi. (2006) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama

sumbangan.¹⁹ Definisi Kontribusi berdasarkan kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan kata “kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokongan”, dalam pengertian yang lebih mendalam kontribusi diartikan sebagai bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Pengertian Kontribusi juga diungkap oleh Yudianto dalam kamus Umum bahasa Indonesia yakni mengartikan kata kontribusi adalah sebagai bentuk bantuan iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan kedua pengertian diatas bahwa kontribusi adalah bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. Hal ini akan mempersempit bentuk kontribusi itu sendiri, hal ini akan menimbulkan makna yakni hanya orang – orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan. Jadi pengertian kontribusi sendiri adalah tidak terbatas pada bantuan pemikiran, bantuan tenaga dan dalam bentuk lain seperti bantuan pemikiran, bantuan tenaga dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada 8 Mei 2020

Sejalan dengan paparan dari makna “ Kontribusi”, yang mana tidak terbatas hanya kontribusi secara materi atau dana saja namun juga kontribusi dalam bentuk lain yakni kontribusi non materi. Dalam program bantuan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Pk2) berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat desa yang mana masyarakat akan menjadi lebih sejahtera dan juga terangkat perekonomiannya. Tujuan umum program Jalin matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Pk2) adalah membantu masyarakat rentan miskin tidak terperosik lebih kedalam jurang kemiskinan yang lebih besar. Adapun kontribusi Jalin Matra Pk2 kepada pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:

1) Kontribusi Materi

Kontribusi materi adalah kontribusi yang kaitanya dengan sumbangan berupa uang/dana. Dalam hal ini kontribusi jalin Matra Pk2 meliputi:

a) Bentuk bantuan pinjaman modal Jalin Matra Pk2

Bantuan pinjaman modal Jalin matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan merupakan bantuan keuangan / modal dari Pemerintah Jawa Timur, pemberian dana pinjaman murah kepada RTS melalui BUMDesa yang digunakan sebagai modal usaha / tambahan modal usaha ekonomi produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka.²⁰

²⁰ Pedoman Umum JALIN MATRA Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2018, hal.11

b) Sasaran bantuan program Jalin Matra Pk2

Sasaran dari bantuan Jalin Matra Pk2 adalah masyarakat yang rentan menjadi miskin yakni yang berada pada desil 2 dan desil 3, yang mana penentuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berada pada desil 2 dan desil 3 sudah ditentukan oleh Pemerintah Jawa Timur berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpad (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM).²¹

c) Jumlah dana bantuan Jalin Matra PK2 per warga

Bantuan pinjaman modal yang akan diterima oleh RTS akan berbeda tergantung kesepakatan dari pengelola yakni oleh BUMDesa setempat. Jumlah dana pinjaman modal tersebut berkisar antara Rp 1.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00.

d) Syarat penerima bantuan Jalin Matra Pk2

Syarat – syarat penerima bantuan pinjaman modal Pk2 tersebut seperti: RTS berusia produktif, yakni antara 15-65 tahun, masuk kedalam kriteria desil 2 dan desil 3, RTS berpotensi/ sudah memiliki usaha, sukarela membentuk kelompok masyarakat.²²

2) Kontribusi Non Materi

Kontribusi non materi adalah bentuk lain dari kontribusi selain yang berkaitan dengan dana / uang, dalam hal ini Kontribusi Jalin Matra adalah yang terkait dengan pendampingan dan evaluasi.

²¹ *Ibid.*, hal 4

²² *Ibid.*, hal.7

a) Ketepatan sasaran bantuan Jalin Matra Pk2

Pengelola dalam hal ini BUMDesa merealisasikan bantuan Jalin Matra harus sesuai dengan data penerima yang sudah ditetapkan dari Pemerintah Jawa Timur yang tertera pada Basic Data Terpadu yang akan diverifikasi lagi kenyataannya oleh pengelola Jalin Matra Pk2.

b) Sistem pendampingan dari pengelola terkait Jalin Matra Pk2

Dana bantuan dari program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dikelola oleh BUMDesa yang akan mendampingi penerima bantuan Jalin Matra Pk2, pendampingan pengelola berupa membantu pembentukan pokmas, melakukan verifikasi kelayakan RTS penerima pinjaman, memastikan pemanfaatan pinjaman, memastikan keberlangsungan usaha RTS yang diharapkan terjadi peningkatan ekonomi. Pembentukan Pokmas merupakan salah satu syarat RTS dapat menerima pinjaman modal PK2, yang mana RTS secara sukarela membentuk pokmas beranggotakan lima sampai sepuluh orang berdasarkan usaha sejenis atau tidak sejenis atau bisa karena faktor kedekatan rumah tempat tinggal, dari pokmas akan ada ketua pokmas yang menjadi penanggung jawab dalam pokmas tersebut.²³

²³ *Ibid.*, hal 34

c) Tingkat pengembalian bantuan Jalin Matra Pk2

Dana Pinjaman modal yang diberikan kepada RTS harus dikembalikan kepada BUMDesa guna untuk dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan pinjaman bisa menggunakan pola konvensional atau bagi hasil sesuai dengan kearifan lokal yang dibuat dalam rembug Pokmas bersama BUMDesa. Untuk itu pengelolaan pinjaman secara konvensional, jasa pinjaman minimal 0,5% dan maksimal 1%.

B. Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Istilah pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan pengutang (pemberi hutang). Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan- batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Adapun sebagai tujuan bahwa pinjaman ekonomi menunjukkan pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik, ekonomi maupun sosial, seperti halnya memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri.²⁴

Pinjaman ekonomi saat ini dikenal sebagai pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Upaya pinjaman ekonomi tersebut akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun saat ini pinjaman ekonomi bukan hanya dengan upaya peningkatan produktivitas saja namun dengan adanya kemitraan kerja sama yang erat antara yang maju dengan yang lemah, dan yang berkembang belum berkembang.

Menurut *Brymont P. Kent* Pinjaman Ekonomi adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang- barang pada waktu sekarang. Disisi lain *Thomas Suyatno* mengatakan bahwa pinjaman adalah

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Refika Aditama,2005), hlm. 59-60

penyediaan uang yang disamakan tagihan- tagihan yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan meminjamkan.²⁵

Adapun arti dari Pinjaman adalah bagian dari paradigma pembangunan ekonomi yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia dalam lingkungannya, baik dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manejerial.

C. Program Pinjaman Jalin Matra PK2

1. Pengertian Jalin Matra

Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) adalah program ini merupakan program yang dijalankan oleh pemerintahan desa guna untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Program Jalin Matra ini dalam tujuannya secara khusus membidik kelompok rumah tangga yang berada pada 2 dan 3 desil atau mereka yang berada dalam kategori kelompok Rumah Tangga yang Hampir Miskin (RTHM), kelompok RTHM tersebut sebagai kelompok masyarakat yang rentang menjadi miskin. Secara esensial RTHM yang berada di 2 dan 3 desil adalah rumah tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya relative cukup mampu dalam mencukupi kebutuhannya, tetapi jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya.

²⁵ Pinjamanekonomi.<http://www.kmpasiana.com/PemberdayaanEkonomi> Diakses pada 1 Desember 2019, pk1 09.50 WIB.

2. Ruang lingkup dari Program Jalin Matra PK2, adalah:

- a. Pembentukan/Penguatan BUMDesa
- b. Pengembangan usaha Pokmas
- c. Peningkatan Kapasitas RTS
- d. Pendampingan

Agar mencapai sasaran yang diharapkan, maka program Jalin Matra PK2 mempunyai prinsip dalam pengelolaannya, yaitu :

- a. Usaha ekonomi produktif
- b. Ekonomi spesifik kawasan
- c. Kompetisi sehat
- d. Berbasis kompetensi lokal
- e. Bergulir²⁶

3. Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Pk2)

Secara umum kerentanan kemiskinan dapat juga diartikan sebagai kemungkinan individu atau rumah tangga untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan di masa yang akan datang. Menurut *Chaudhuri* 2002 (dalam *Achintya* 2016) mendefinisikan kerentanan terhadap kemiskinan sebagai probabilitas untuk menjadi atau tetap pada status miskin pada waktu tertentu. Menurut *Chanbers* dapat dilihat dari ketidak mampuan keluarga miskin untuk menyediakan

²⁶ Mardi, Zulkarnaini, "Program Bantuan Keuangan Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2014, hlm. 115-226

sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan poverty racket atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya. Menurut Robert Chambers dalam konseptualnya bahwa kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) tersebut lazim disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan merupakan program pengentasan kemiskinan dengan nama “Jalan Lain Menuju Sejahtera”. Pada tahun anggaran 2015 ini, Program Jalin Matra PK2 masih merupakan *Pilot Project*, yang secara khusus membidik kelompok rumah tangga yang berada pada desil 2 dan desil 3 atau mereka yang berada dalam kategori kelompok Rumah Tangga yang Hampir Miskin (RTHM). Melalui *Pilot Project* Jalin Matra PK2, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berniat untuk mendorong kepompok masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan 3 agar tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan, atau kelompok desil 1. Secara

esensial, RTHM yang berada di desil 2 dan 3 adalah rumah tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya relative cukup mampu dalam mencukupi kebutuhannya, tetapi jika ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya.

Adapun tujuan umum Jalin Matra PK 2 adalah untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil1. Sedangkan tujuan khususnya dari jalin matra Pk2 adalah:

1. Mendorong masyarakat yang berada pada rentan kemiskinan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya.
2. Mendorong agar masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian pedesaan²⁷

²⁷ Ginanjar K. 1997. Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, dan Penerapan. (t.p).

4. Tujuan PK2

Adapun tujuan umum Jalin Matra PK 2 adalah untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil1. Sedangkan tujuan khususnya dari jalin matra Pk2 adalah:

1. Mendorong masyarakat yang berada pada rentan kemiskinan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya.
2. Mendorong agar masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian pedesaan.

5. Prinsip Dasar PK2

Beberapa prinsip PK2 yang digunakan *Pilot Project* Jalin Matra adalah:

- 1) Membantu dengan Hati

Pilot Project Jalin Matra PK2 pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rumah tangga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap

berdaya keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, *Pilot Project* Jalin Matra PK2 dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar membantu dengan hati yang mengedepankan empati sosial;

2) Partisipatoris

Pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif RTS dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup melalui penggalan masalah lewat rembug dan tukar pengalaman diantara warga. Rembug warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan usaha RTS sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual berdasar potensi usaha masyarakat yang telah berjalan dan potensi wilayah. Pengembangan dan keberlanjutan manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris RTS (desil 2 dan desil 3) untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan aset yang dimilikinya;

3) Transparan dan Akuntabel

Pilot Project Jalin Matra PK2 dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,

atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

6. Kendala Pk2

Dalam hal ini kendala yang dimiliki oleh Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Pk2) dalam mengembangkan ekonomi yang ada di Desa Pucung Kidul yaitu sebagai berikut:

- a. Rendahnya koordinasi dan keterpaduan kegiatan antar masyarakat satu dengan lainnya dalam rangka mendukung memperkuat ekonomi di desa tersebut.
- b. Masih rendahnya peran lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, termasuk fasilitator pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan.

D. Konsep Dasar Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat.²⁸ Dapat

²⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 887

diartikan sebagai kata atau ucapan yang menunjuk kepada keadaan baik dimana orang – orang yang terlibat di dalamnya berada dalam kondisi sehat, damai, makmur dan selamat. Dalam artian lebih luas kesejahteraan adalah terbatasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rassa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang tentram secara lahiriah maupun batiniah.

Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.²⁹

Menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas yang semakin meningkat dan merata.³⁰

World Health Organization (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan,

²⁹ Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan* , (Jakarta: LIPI Pers, 2011), hlm. 22

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Pertama. 2015), hlm 86

harapan, standard dan juga perhatian terhadap kehidupannya. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan social individu dengan lingkungannya.³¹

Menurut *Rambe* dalam *buku Euis Sunarti*, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir natin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha – usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.³²

Sedangkan menurut *Bubolz dan Sontang (1993)*, kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality humen life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai – nilai hidup.³³

2. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per- kapita, angka kriminalitas. Angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan

³¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012), hlm 44

³² Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan*, (Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2005), ISBN 978-602-866505-6, hlm 15

³³ *Ibid*, hlm. 15

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitikberatkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Dijelaskan dalam pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang - Undang No. 10 Tahun 1992 sebagai berikut:

a. Tahap Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat - syarat keluarga sejahtera I.

b. Tahap Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan akan agama atau ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan KB. Tahapan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang memenuhi 6 (enam) indikator sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga makan dua kali sehari.

- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

c. Tahap Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungan, serta akses kebutuhan memperoleh informasi. Tahapan keluarga sejahtera II memenuhi indikator sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing.
- 2) Anggota keluarga makan daging/ ikan/telur paling tidak seminggu sekali.
- 3) Dalam setahun anggota keluarga paling tidak memiliki pakaian baru.

- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah.
- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing – masing.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat. Tahapan keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 5 (lima) indikator KS II dan 5 (lima) indikator berikut:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahap KS I, 5 (lima) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III dan 2 (dua) indikator KS III plus. 2 (dua) indikator tersebut yaitu:

- 1) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.³⁴

Adapun menurut *Badan Pusat Statistik (BPS)*, kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga

³⁴ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx, diakses pada 5 Juli 2020 pukul 18.28 WIB

kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakatmenjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

Berdasarkan indikator- indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.³⁵

3. Unsur – Unsur Kesejahteraan

a. Unsur Material Kesejahteraan

Unsur material kesejahteraan berangkat dari suatu pemikiran bahwa manusia memiliki fisik (badan) sehingga memiliki kebutuhan material untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia adalah sandang, pangan, papan atau perumahan.³⁶ Hanya dengan dipenuhinya ketiga kebutuhan dasar tersebut, manusia dapat hidup secara layak.

³⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), hlm. 96

³⁶ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bkkbn, aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx, diakses pada 30 Mei 2020 pukul 20.03 WIB

b. Unsur Non Material Kesejahteraan

Secara konseptual untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, disamping unsur materi dan lahir, diperlukan unsur kesejahteraan batiniah. aspek batin sangat luas dan sekaligus rumit. unsur Batin menyangkut kebutuhan spiritual, jiwa, akal, dan emosi, atau perasaan. Dalam sistem ekonomi Indonesia, unsur non material ini terdiri dari tiga komponen, yaitu spiritual, jiwa atau nyawa, dan akal.³⁷

E. Indikator Pinjaman Masyarakat Desa Pucung Kidol

Menurut Kusnadi dikutip oleh Widyawati mengatakan bahwa ada beberapa indikator kualitatif yang menandai suatu masyarakat membutuhkan pinjaman, yaitu:

- a. Tercapainya kesejahteraan baik dibidang sosial - ekonomi baik dalam individu itu sendiri, rumah tangga maupun dalam masyarakat.
- b. Kelembagaan ekonomi yang berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi yang stabil.
- c. Kelembagaan sosial yang berfungsi dengan baik sebagai instrument pembangunan masyarakat lokal.
- d. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi baik dalam hal

³⁷ *Ibid*, hal 63

mendapatkan informasi dan kemampuan menggunakan teknologi yang modern.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan tumbuhnya kesadaran warga untuk menjalankan usaha dengan baik demi kesejahteraan warga desa.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Ulumiyah, Gani, Midarti,³⁸ bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa apakah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pemberdayaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama menggunakan metode kualitatif dan membahas variable kesejahteraan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan tidak membahas variable kesejahteraan desa pucung kidul dengan objek penelitian masyarakat desa pucung kidul kabupaten Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan Kurniawan,³⁹ bertujuan untuk mengetahui optimalisasi program penanggulangan kerentanan kemiskinan pada desa bringin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

³⁸ Ita Ulumiyah, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol ,1,No. 5, Hal. 890-899

³⁹ Yudiyanto Tri Kurniawan, *Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan di Desa Bringin* (Studi kasus Program Jalin Matra Pk 2 di Desa Bringin Montong Kabupaten Tuban)

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi jalin matra Pk 2 pada desa Bringin mulai tersendat pada saat RTS (Rumah Tangga Sasaran) tidak mencicil tepat waktu sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama menggunakan metode Kualitatif dengan membahas variable kesejahteraan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan tidak membahas variable kesejahteraan desa pucung kidul dengan objek penelitian masyarakat desa pucung kidul kabuoaten tulungagung.

Penelitian yang dilakukan Teja,⁴⁰ bertujuan untuk mengetahui bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan segara anakan dalam bidang social masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mendapatkan kesempatan dalam merubah kehidupan perekonomian dilakukan dengan memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kesejahteraan masyarakat pesisir selatif signifikan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama menggunakan metode kualitatif dengan membahas variable kesejahteraan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan tidak membahas variable kesejahteraan desa pucung kidul dengan objek penelitian desa pucung kidul kabupaten tulungagung.

⁴⁰ Mohamad Teja , Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Dalam jurnal Aspirasi* Vol 6 No 1, Juli 2015 (Online)

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dkk,⁴¹ Bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa (Bumdesa) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan apakah sudah maksimal dan sudah memenuhi target pada sasaran yang dituju. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Bumdesa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gunung Kidul. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama menggunakan metode kualitatif dan membahas variable kesejahteraan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan tidak membahas variable kesejahteraan desa pucung kidul dengan objek penelitian masyarakat desa pucung kidul kabupaten tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Oman Sukmana,⁴² bertujuan untuk mengetahui konsep dan desain negara kesejahteraan apakah sudah optimal dalam mengembangkan Negara kesejahteraan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kesejahteraan merupakan konsep suatu Negara untuk menjadikan suatu Negara menjadi lebih maju sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat suatu desa. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama - sama menggunakan metode kualitatif dan membahas variable kesejahteraan. Perbedaan dengan

⁴¹ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes DI Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam Jurnal Modus Vol.28 (2), 2006

⁴² Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam *jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (Juli – Desember 2016),hlm 103-122

penelitian yang akan dilakukan tidak membahas variable kesejahteraan desa pucung kidul dengan objek penelitian masyarakat desa pucung kidul kabupaten tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Justia Dura Desen STIE Asia Malang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, kebijakan desa secara bersama - sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama menggunakan metode kualitatif dan membahas variable kesejahteraan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan tidak dibahas variable kesejahteraan desa pucung kidul dengan objek penelitian masyarakat desa pucung kidul.⁴³

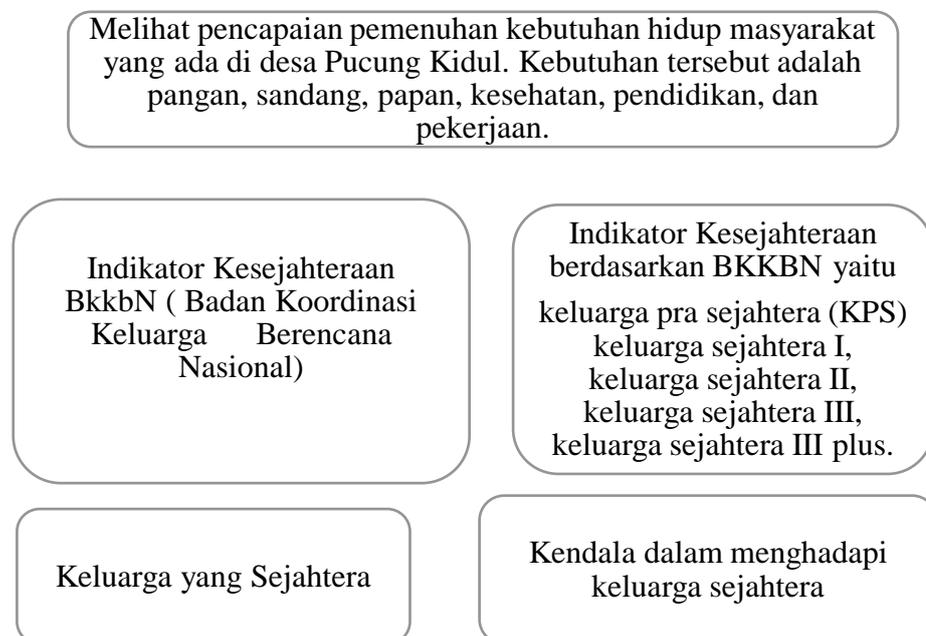
Penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kesejahteraan desa Bali berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama - sama menggunakan metode kualitatif

⁴³Justia Dura, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dalam Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016 : 26- 32

dan membahas variable kesejahteraan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan tidak membahas variable kesejahteraan desa Pucung Kidul dengan objek penelitian masyarakat Desa Pucung Kidul Kabupaten Tulungagung.⁴⁴

G. Kerangka Berfikir Teoritis

Gambar 1.1



Keterangan :

Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Pucung Kidul, maka hal yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi pemenuhan

⁴⁴ I Komang Oka Artana Yasa, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Desparitas Pendapatan Antar daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. Dalam Jurnal JEKT ISSN: 2301 - 8968

kebutuhan hidup yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan juga pekerjaan. Selanjutnya dianalisa menggunakan indikator kesejahteraan berdasar kepada BkkbN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional). Berdasarkan analisa tersebut diketahui bagaimana masyarakat desa Pucung Kidul dalam mencapai hidup yang sejahtera.